

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Penelitian

Pembangunan dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat tidak terlepas dari beberapa langkah mulai dari perencanaan, pelaksanaan maupun pengendalian yang dilakukan secara berkesinambungan. Mengingat ruang lingkungannya yang sangat luas, kegiatan pembangunan tidak semata-mata menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah melainkan harus dilakukan dan didukung oleh seluruh komponen masyarakat. Oleh karena itu, hubungan kemitraan Pemerintahan Daerah, dan masyarakat merupakan hubungan sangat strategis dan harus menjadi perhatian terutama untuk memecahkan berbagai permasalahan dalam pembangunan kesejahteraan sosial.

Dalam UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dalam pelaksanaan otonomi daerah menyatakan bahwa “kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian dari daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat.” Dapat dipahami bahwa dalam penyelenggaraan system pemerintahan, posisi kecamatan berkedudukan sebagai perangkat daerah kabupaten/kota sekaligus penyelenggara pemerintah umum. Sebagai perangkat daerah, camat melaksanakan sebagian kewenangan Bupati/Wali Kota yang dilimpahkan dan sebagai penyelenggara pemerintahan umum, camat secara berjenjang melaksanakan tugas pemerintah pusat di wilayah kecamatan.

Menurut Ryaas (dalam Labolo : 2013) Pembangunan dan pemberdayaan ini merupakan bagian dari empat fungsi pemerintahan. Ryaas membagi fungsi pemerintahan mejadi empat bagian, yaitu pelayanan (*public service*), pembangunan (*developsment*), pemberdayaan (*empowering*), dan pengaturan (*regulation*). Salah satu cara untuk menjalankan fungsi pemerintahan tersebut pada tanggal 19 Maret 2015 Ridwan Kamil selaku Walikota Bandung membuat Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK). Program ini disandarkan pada Peraturan Walikota Bandung Nomor 436 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Bandung Nomor 281 Tahun 2015 Tentang Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan Kota Bandung.

Sesuai Peraturan Menteri Dalam Nengeri No 21 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah. Pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) dilaksanakan di daerah kewilayahan. PIPPK dilaksanakan di kelurahan hal tersebut Sesuai dengan Peraturan Daerah kota Bandung No 02 tahun 2013 tentang Lembaga Kemasyarakatan Kelurahan.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif dari seluruh masyarakat dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat.

Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) tentunya memiliki maksud dan tujuan. Maksud dari program ini adalah untuk meningkatkan tugas, peran dan fungsi aparat kewilayahan beserta seluruh *stakeholder* lembaga kemasyarakatan kelurahan dalam rangka percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat. Sedangkan tujuan dari program ini adalah untuk mempercepat proses dan pelaksanaan pembangunan khususnya dalam meningkatkan fungsi, kemampuan dan peran kelompok masyarakat di kelurahan untuk menampung, menyalurkan aspirasi, mengkoordinasikan sekaligus melaksanakan proses pembangunan yang inovatif secara mandiri melalui metode pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Gedebage merupakan salah satu kecamatan yang ada di Kota Bandung yang melaksanakan kebijakan PIPPK. PIPPK sendiri merupakan fokus pengembangan kewilayahan sebagai bagian desentralisasi kewilayahan di kecamatan. Mengingat dan melihat kecamatan itu memiliki luas wilayah sendiri yang sangat besar, jarak gesture politik, jumlah penduduk, dan potensi yang dipunyai. Sasarannya, percepatan pelaksanaan pembangunan melalui pengembangan pemberdayaan masyarakat.

Kecamatan Gedebage, terdiri atas 4 Kelurahan, yaitu Kelurahan Cisaranten Kidul, Kelurahan Rancabolang, Kelurahan Cimincrang dan Kelurahan Rancanumpang. Dari beberapa kelurahan yang ada di Kecamatan Gedebage, Kelurahan Cimincrang ini merupakan salah satu kelurahan yang memang luas wilayahnya dan dalam penyerapan anggaran PIPPK dengan uraian penyerapan anggaran Karang Taruna (89,%) di tahun Anggaran 2018.

Penyerapan anggaran menjadi salah satu tolak ukur dalam keberhasilan pelaksanaan kebijakan PIPPK ini. Namun dengan melihat realisasi ruang lingkup pelaksanaan PIPPK dengan penyerapan anggaran tersebut ada beberapa ruang lingkup yang belum juga terlaksana di Kelurahan Cimincrang. Dalam penelitian ini penulis lebih berfokus pada PIPPK di LKK Karang Taruna.

Karang Taruna di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage, yang bernama Karang Taruna Sauyunan menjadi fokus penulis untuk diteliti. Program yang diselenggarakan guna usaha meningkatkan kesejahteraan sosial tersebut di dukung dari dana PIPPK.



Program Kegiatan Karang Taruna Kelurahan Cimincrang 2018

Tabel I.1

PROGRAM	SEBELUM PROGRAM	TARGET	REALISASI
Pelatihan Tata Boga Membuat Baso	3 Pengusaha Baso	8 Pengusaha Baso	3 pengusaha Baso
Pembentukan Kelompok Berkebun	1 kelompok berkebun	8 kelompok Berkebun	1 kelompok Berkebun
Penguatan Kelembagaan	10 Anggota Pengurus Inti Karang Taruna	24 Anggota Pengurus Inti Perwakilan 3 orang Karang Taruna persetiap RW	15 Anggota Pengurus Inti Dan masih belum ada keterwakilan dari beberapa RW Karang Taruna

Sumber: Diolah Peneliti (2019)

Program tersebut yang telah dilaksanakan di lingkup Karang Taruna kelurahan Cimincrang dalam penyerapan anggaran program PIPPK. Program tersebut diharapkan dapat menjadi peluang dalam memberdayakan masyarakat dikewilayahan guna untuk kesejahteraan sosial bagi. Namun sangat disayangkan ada beberapa program belum dilaksanakan dengan optimal.

Berdasarkan permasalahan dan fenomena yang telah penulis jabarkakan di atas bahwasanya penulis bermaksud untuk melakukan penelitian dengan judul : **Evektifitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK (Studi kasus : Karang Taruna di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2018)**

1.2 Identifikasi Masalah

Identifikasi masalah berkenaan dengan Efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK (Studi kasus : Karang Taruna di Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung tahun 2018) yaitu:

1. Pemuda karang taruna belum sepenuhnya memahami tentang peran karang taruna untuk masyarakat.
2. Organisasi karang taruna kelurahan cimincrang belum memahami PIPPK secara optimal.
3. Kurangnya minat pemuda untuk bergabung aktif dalam keorganisasian tersebut.
4. Belum ada tindak lanjut dari pelatihan -pelatihan dari serapan dana PIPPK.

1.3 Rumusan Masalah

Berdasarkan fokus penelitian diatas maka masalah yang akan dibahas yaitu :

1. Bagaimana efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung?
2. Bagaimana Hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrag Kecamatan Gedebage?

3. Bagaimana upaya dalam mengatasi hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrag Kecamatan Gedebage?

1.4 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas maka tujuan di adakan penelitian ini yaitu untuk mengetahui diantaranya

1. Efektivitas program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrag Kecamatan Gedebage Kota Bandung
2. Hambatan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrag Kecamatan Gedebage
3. Upaya yang akan dilakukan dalam pelaksanaan Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan PIPPK Pada Organisasi Karang Taruna Kelurahan Cimincrag Kecamatan Gedebage

1.5 Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan atau manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Manfaat secara teoritis

Untuk memperkuat pengembangan ilmu Administrasi Publik. serta menambah ilmu pengetahuan melalui penelitian yang

dilaksanakan sehingga memberikan kontribusi dari segi keilmuan dan pengembangan ilmu administrasi publik khususnya. Selanjutnya agar dapat dijadikan sebagai acuan untuk pengembangan ilmu yang terkait dalam masalah tersebut.

2. Manfaat Praktis

- a. Bagi penulis, diharapkan dapat menambah wawasan untuk pembangunan Intelektual dibidang akademis sehingga mampu menerapkan teori-teori yang ada dan dapat diaplikasikan dikehidupan nyata.
- b. Bagi kampus, untuk menambah kepustakaan Program Studi Administrasi Publik Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati.
- c. Bagi instansi terkait, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan dan sumbang asih pikiran bagi organisasi mitra desa Karang Taruna.

1.6 Kerangka Pemikiran

Program merupakan salah satu bagian dari bentuk kebijakan publik. Kebijakan administratif yang masih berupa pernyataan-pernyataan umum yang berisikan tujuan, sasaran, serta berbagai macam sarana, diimplementasikan dan dijabarkan lagi dalam bentuk program-program yang bersifat operasional. Program yang bersifat operasional adalah program-program yang isinya dengan mudah dapat dipahami dan dilaksanakan oleh pelaksana. Program tersebut tidak hanya berisi mengenai

kejelasan tujuan atau sasaran yang ingin dicapai oleh pemerintah, melainkan secara rinci telah menggambarkan pula alokasi sumber daya yang diperlukan, kemudian kejelasan metode dan prosedur kerja yang harus ditempuh, dan kejelasan standar yang harus dipedomani. (Tachjan, 2008:31).

Dalam penelitian ini, peneliti melakukan penelitian yang berjudul “Efektivitas Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan PIPPK (Studi Kasus : Karang Taruna Kelurahan Cimincrang Kecamatan Gedebage Kota Bandung”. Program Inovasi Pembangunan dan Pemberdayaan Kewilayahan (PIPPK) ini berawal dari pemikiran dan pandangan bahwa perubahan-perubahan dinamis yang terjadi di tengah masyarakat dapat dicapai secara optimal apabila ditempuh melalui peran serta dan partisipasi aktif yang luas dari seluruh masyarakat mulai dari tingkat paling bawah terutama dalam pengambilan keputusan dalam memecahkan berbagai permasalahan melalui metode Pemberdayaan Masyarakat. Sehingga Perwal ini diakomodir dan dimasukkan dalam Peraturan Daerah Kota Bandung Nomor 03 Tahun 2014 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Bandung tahun 2013-2018.

Ukuran keberhasilan sebuah program dapat dilihat dari efektivitas pencapaian tujuan yang telah ditetapkan. Suatu program dikatakan efektif ketika dalam pelaksanaannya program tersebut sudah bisa mencapai tujuan yang telah ditentukan sebelumnya. Efektivitas program merupakan pencapaian hasil dari suatu program yang telah ditentukan sebelumnya

oleh pelaksana program dengan mencantumkan indikator keberhasilan dari program tersebut.

Selanjutnya untuk mengukur Efektivitas program merupakan salah satu penilaian atau pengukuran terhadap sejauh mana kegiatan dalam program-program yang telah dirumuskan dan dilaksanakan dapat mencapai tujuan program itu sendiri. Subagyo dalam (Budiani : 2007) menyebutkan beberapa indikator yang digunakan untuk mengukur efektivitas adalah sebagai berikut :

- a. Ketepatan sasaran program, yaitu sejauh mana peserta program tepat yang sudah ditentukan sebelumnya. Menurut (Makmur:2011) ketepatan sasaran lebih berorientasi kepada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penentu sasaran yang tepat baik ditetapkan secara individu maupun sasaran yang ditetapkan organisasi sesungguhnya sangat menentukan keberhasilan aktivitas organisasi. Demikian pula sebaiknya, jika sasaran yang ditetapkan itu kurang tepat maka akan menghambat pelaksanaan berbagai kegiatan itu sendiri.
- b. Sosialisasi program, yaitu kemampuan penyelenggaraan program dalam melakukan sosialisasi program sehingga informasi mengenai pelaksanaan program dapat tersampaikan kepada masyarakat pada umumnya dan sasaran peserta program pada khususnya. Menurut Wilcox dalam (Mardikonto:2013), Memberikan informasi merupakan langkah awal yang dilakukan untuk mendapatkan hasil

yang lebih maksimal dan memperlancar dalam melanjutkan suatu pekerjaan, karena dengan memberikan informasi dapat dipergunakan dan meningkatkan pengetahuan bagi orang yang menerima informasi tersebut

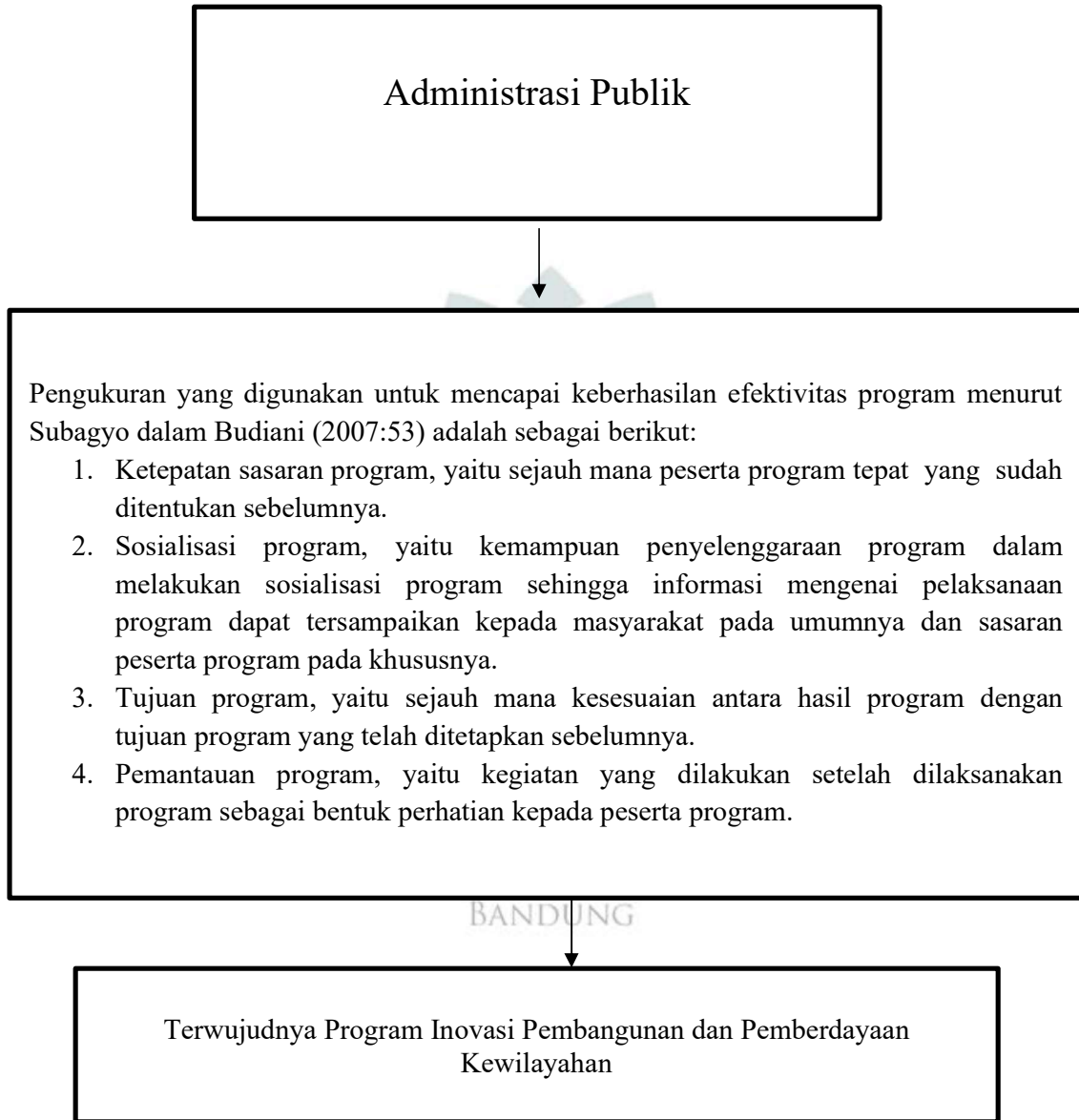
- c. Tujuan program, yaitu sejauh mana kesesuaian antara hasil program dengan tujuan program yang telah ditetapkan sebelumnya. Menurut Duncan dalam Streers (1985:53) menyebutkan bahwa pencapaian tujuan adalah keseluruhan upaya pencapaian tujuan harus dipandang sebagai suatu proses. Oleh karena itu, agar pencapaian tujuan akhir semakin terjamin, diperlukan pentahapan baik dalam arti pentahapan pencapaian bagian-bagiannya maupun pentahapan dalam arti periodisasinya. Pencapaian tujuan terdiri dari beberapa faktor yaitu :
kurun waktu dan sasaran yang merupakan target yang kongkrit.
- d. Pemantauan program, yaitu kegiatan yang dilakukan setelah dilaksanakan program sebagai bentuk perhatian kepada peserta program. Selanjutnya menurut Winardi (2010:7), pengawasan meliputi tindakan mengecek dan membandingkan hasil yang dicapai dengan standar-standar yang telah digariskan. Apabila hasil yang dicapai menyimpang dari standar yang berlaku perlu dilakukan tindakan korektif untuk memperbaikinya. Selanjutnya menurut Bohari (1992:3) pengawasan merupakan suatu bentuk pemeriksaan atau pengontrolan dari pihak yang lebih kepada bawahannya. Siagian dalam Situmorang Dkk (1993:19) menyebutkan bahwa pengawasan

merupakan proses pengamatan daripada pelaksanaan seluruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar supaya pekerjaan yang sedang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya. Berdasarkan beberapa pengukuran efektivitas diatas, peneliti menggunakan indikator-indikator untuk mengukur efektivitas menurut Budiani (2007:53) .



Gambar 1.1

Kerangka Pemikiran Penelitian



Sumber: Diolah Peneliti (2018)